

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu tahun anggaran 2014-2016, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Belu. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Belu berfluktuatif setiap tahun selama tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2014-2016.
- b Dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah, pada Kabupaten TTU hal ini selalu memperlihatkan adanya peningkatan setiap tahunnya, meskipun kemandirian keuangannya selama periode pengamatan masih tergolong rendah sekali dengan rata-rata persentasenya sebesar 5,18%. Hal itu pula terjadi pada Kabupaten Belu, dimana kemampuan keuangan daerahnya dinilai rendah sekali dengan rata-rata persentasenya sebesar 11,22% sehingga memiliki pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan Pemerintah Daerah. Meskipun rasio kemandirian keuangan kedua kabupaten ini tergolong rendah, tetapi dalam perbandingan antara keduanya,

kemandirian keuangan Kabupaten Belu lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

- c Terkait dengan ketergantungan keuangan daerah, kedua kabupaten ini baik Kabupaten Timor Tengah Utara maupun Kabupaten Belu kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah yang begitu tinggi terhadap transfer Pemerintah Pusat, yaitu masing-masing sebesar 94,92% untuk Kabupaten Timor Tengah Utara dan 89,28% untuk Kabupaten Belu. Meskipun rasio ketergantungan keuangan daerah kedua kabupaten ini sama-sama tergolong sangat tinggi, tetapi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belu masih lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- d Terkait dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, untuk kedua kabupaten ini baik Kabupaten Timor Tengah Utara maupun Kabupaten Belu terbukti masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, yaitu masing-masing sebesar 4,83% untuk Kabupaten Timor Tengah Utara dan 10,31% untuk Kabupaten Belu. Dalam kaitannya dengan perbandingan antara keduanya, kontribusi PAD Kabupaten Belu terhadap total pendapatan daerah lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- e Dalam kaitannya dengan kontribusi Pajak daerah terhadap total penerimaan daerah, pencapaian Kabupaten Timor Tengah Utara dan

Kabupaten Belu masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD, yaitu masing-masing sebesar 87,25% untuk Kabupaten TTU dan 88,95% untuk Kabupaten Belu. Meskipun demikian, rasio efektivitas PAD Kabupaten Belu terhadap total pendapatan daerah lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

- f Dalam hal kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam merealisasikan pendapatan pajak daerahnya, terbukti kabupaten ini mampu melakukannya secara lebih efektif jika dibandingkan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 93,29% dan Kabupaten Belu sebesar 86,64%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu untuk meningkatkan kinerja keuangannya, baik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun melalui kebijakan dalam mengelola keuangan daerahnya. Ketika pendapatan asli daerah terus meningkat setiap tahunnya, maka ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat akan menurun dan tingkat kemandiriannya akan meningkat pula, serta kesejahteraan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faizal. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adhiantoko, Hony. (2013). “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*”. [Online]. Tersedia: 17 Mei 2018. <http://Eprints.uny.ac.id>
- Ahmamd, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Anonim, Undang-Undang No. 23 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Jakarta.
- Anonim, Undang-Undang 33 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004*.
- Anonim Peraturan Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Anonim Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim Undang-Undang Nomo 17 tahun 2003 pasal 31 Tentang keuangan Negara.
- Azhar , MKS. (2010). “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*”. [Online]. Tersedia: <http://siastie.harapan.acc.id>
- Cahyadi, MI. (2012). “*Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*”. [Online]. Tersedia: <http://repository.uin.suska.ac.id>
- Harahap, Sofyan S. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdull. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdull. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:

BPFE.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.

Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Munir. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Munawir S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ketujuh Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, Rint. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.